

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini berjudul Tokoh GAM Sebagai *Local strongmen* Pada Pilkada Aceh Tahun 2017. Keberadaan tokoh GAM di Provinsi Aceh muncul ketika era reformasi bergulir dan didukung oleh *MoU (Memorandum of Understanding)* antara GAM dengan Pemerintah Indonesia, yang di dalam kesepakatan tersebut memberikan kebebasan bagi Aceh untuk mendirikan dan memiliki partai politik lokal serta pemberian amnesti bagi setiap orang yang ikut dalam kegiatan GAM. Semenjak diterapkannya reformasi politik di Indonesia menyebabkan politik lokal yang ada di tiap daerah bebas melakukan pemilihan langsung oleh rakyat.

Khususnya di Provinsi Aceh dengan mengambil studi kasus pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Aceh Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan konsep orang kuat lokal atau *local strongmen* sebagai pisau analisisnya. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan analisis terhadap karakteristik orang kuat lokal yang ada di Provinsi Aceh. Dimulai dengan dinamika konflik antara GAM dengan Pemerintah Indonesia dan sampai pada karakteristik tokoh GAM sebagai *local strongmen* di Provinsi Aceh. Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Aceh Tahun 2017 terdapat tiga orang tokoh GAM yang mencalonkan diri sebagai Gubernur, serta Gubernur yang terpilih adalah salah satu tokoh GAM.

Berdasarkan hasil dari temuan peneliti mengenai kemunculan serta karakteristik dari orang lokal diantaranya. Mengenai tokoh GAM sebagai orang kuat lokal di Aceh dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu pertama, kesamaan latar belakang masyarakat Aceh dengan latar belakang tokoh GAM. Latar masyarakat Aceh yang dikenal dengan masyarakat yang gigih dalam perjuangan, begitu juga dengan latar belakang tokoh GAM menjadi selaras dengan dukungan masyarakat Aceh di politik demi memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Kedua, kontrol sosial yang dilakukan oleh tokoh GAM. Kontrol sosial yang dilakukan tokoh GAM adalah dengan program ketika menjabat sebagai Gubernur, seperti JKA, pembangunan *Gampong Gammawar*, dan bantuan rumah dhuafa, insentif pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada masyarakat umum dan Dayah/Pesantren serta akses terbuka bagi masyarakat menyampaikan aspirasi. Selain program pada saat menjabat sebagai Gubernur, kontrol sosial juga dilakukan dengan penguasaan legislatif melalui kader-kader partai politik lokal yang dipimpin oleh tokoh GAM.

Ketiga, penandatanganan *MoU (Memorandum of Understanding)* antara GAM dan Pemerintah Indonesia di Helsinki memberikan dampak besar bagi tokoh GAM sebagai orang kuat lokal di Aceh. dalam kesepakatan tersebut Aceh diberikan kebebasan untuk mendirikan dan memiliki partai politik lokal dan pemberian amnesti bagi setiap orang yang bergabung dalam kegiatan GAM. Dari penandatanganan *MoU* Helsinki tersebut tokoh GAM menjadi pemimpin partai politik lokal, serta mampu menguasai DPRA melalui kader-kader partai politik

lokal yang dipimpin oleh tokoh GAM dan mampu mengatur kebijakan yang akan diambil.

Sedangkan mengenai karakteristik orang kuat lokal di Aceh adalah pemimpin partai politik lokal dan kekuasaan politik. Dengan adanya kebebasan pendirian partai politik lokal di Aceh membuka peluang yang sangat besar tokoh GAM untuk mendirikan dan memimpin partai politik lokal. Penguasaan DPRD dapat dilakukan melalui anggota legislatif yang berasal dari partai politik lokal serta penguasaan legislatif ini membuat tokoh GAM mampu mengatur kebijakan yang akan diambil.

Demikian hasil penelitian ini dengan menggunakan konsep *local strongmen*. Penelitian ini mengasumsikan bahwa tokoh GAM merupakan *local strongmen* di Provinsi Aceh. Hal ini juga dibuktikan dengan analisis peneliti mengenai kebaruan dari penelitian yang berfokus pada karakteristik dari *local strongmen*. Kesimpulan dari penelitian ini, *local strongmen* atau orang kuat lokal yang ada di Provinsi Aceh memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, yaitu pemimpin partai politik lokal dan kekuasaan politik. Sehingga *local strongmen* di Provinsi Aceh tidak menunjukkan hal yang negatif seperti memonopoli dan tindakan ilegal lainnya. Tetapi tetap memiliki kekuatan politik melalui kekuasaannya.

6.2 Saran

Penelitian ini berfokus pada tokoh GAM sebagai *Local strongmen* di Provinsi Aceh dengan memberikan analisis pada karakteristik. Sehubungan dengan temuan-temuan di atas dan juga hasil dari beberapa informan banyak menjelaskan mengenai *MoU* (*Memorandum of Understanding*) antara GAM dengan Pemerintah Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia yang banyak memberikan dampak terhadap politik lokal di Aceh. Karena ini menyangkut politik lokal di Aceh, dan sudah sepatutnya untuk ditelusuri lebih mendalam mengenai realisasi butir-butir *MoU* yang telah disepakati akan memberikan realitas politik lokal yang ada di Provinsi Aceh.

